



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD NASRUM MASSI**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **639764**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.375.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/141 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 449 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/149 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/159 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 255.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 103.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 4.245.901.217**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 10.979.401.217

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.979.401.217

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.